



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua sehingga Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 selesai disusun yang akan menjadi tonggak awal langkah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026. Rencana Kinerja Tahunan ini akan menjadi suatu jembatan menuju ke arah pencapaian tujuan jangka menengah dan jangka panjang pembangunan daerah seperti yang dicita-citakan.

Dokumen Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 ini menggambarkan formulasi indikator kinerja yang bersifat, makro dan mikro serta penetapan target kinerja untuk tahun 2024. Di dalam dokumen ini perencanaan yang disajikan terdiri dari sasaran, indikator sasaran, dan target pencapaian indikator sasarannya. Sebagai suatu dokumen resmi, Rencana Kinerja Tahun 2024 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bentuk komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi beserta seluruh jajarannya untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi visi dan misi organisasi.

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

Akhirnya, kami berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, sehingga komitmen kinerja sebagaimana telah ditetapkan dan merupakan amanah yang harus diemban sebagai pelayanan kepada masyarakat dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 ini. Semoga Allah S.W.T tetap memberikan kekuatan, membimbing dan menyadarkan kita untuk dapat berkarya lebih baik lagi sehingga Visi Kabupaten Kuantan Singingi dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Teluk Kuantan, April 2024

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi



H. MASRUL HAKIM, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19740701 200501 1 006

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DN ASET DAERAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI ii**

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, menjabarkan indikator kinerja yang merepresentasikan langsung kinerja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Rencana Kinerja Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari sasaran dan progam yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, guna pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dalam RPJMD tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan 15 sasaran strategis yang akan dicapai dalam 5 tahun kedepan, dimana dalam rangka pencapaian 15 sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan beberapa indikator sasaran yang diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kuantan Singingi, dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2026. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, pada tahun anggaran 2022 dan sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, telah mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan 1 tahun ke depan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025 yang dijalankan secara terpadu, sinkron, harmonis dan efisien.

Keberhasilan dan kelemahan dalam pencapaian sasaran pada tahun 2022 akan menjadikan sebagai pelajaran dan tetap akan menjadi catatan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja dan pencapaian sasaran di tahun anggaran 2024, sehingga diharapkan kinerja yang

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DN ASET DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI iii

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada segenap masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan.

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Rencana Kinerja Tahunan merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun dan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah untuk tahun yang di rencanakan.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang berisikan informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kinerja Tahunan menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Rencana Kinerja dan Rencana Strategis, sehingga diperlukan Kemampuan Manajerial, Kompetensi, Profesionalisme, dan Komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya mencapai target kinerja yang sudah di tetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023, yang dituangkan dalam bab ini menjabarkan indikator kinerja yang merepresentasikan langsung kinerja dari tiap Perangkat Daerah yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Pencapaian sasarannya dituangkan dalam indikator-indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Ukuran-ukuran keberhasilan ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan ketersediaan anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2023. Anggaran suatu program dan kegiatan dimungkinkan untuk diadakan koreksi atau penyesuaian-penyesuaian

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

yang diperlukan, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.

Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, dan merupakan komitmen yang akan dicapai dalam tahun 2022. Dalam Rencana Kinerja Tahunan tercakup kesepakatan mengenai : (1) sasaran; (2) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja; dan (3) target kinerja. Manfaat perencanaan kinerja yaitu :

1. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
2. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;
4. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
5. Membantu dalam menetapkan target kinerja.

Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara harus mampu merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya serta kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

Sejalan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan/menetapkan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Sistem AKIP terdiri dari 6 komponen, yakni :1) Perencanaan strategis, 2) Perencanaan kinerja, 3) Pengukuran kinerja, 4) Pengelolaan data kinerja, 5) Pelaporan kinerja dan reviu, dan 6) Evaluasi Kinerja.

Pelaksanaan penyusunan Sistem AKIP Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Sistem AKIP, yaitu : (1) Landasan Ideal, yaitu Pancasila; (2) Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945; dan (3) Landasan Operasional yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten RokanHulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

- Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor);
18. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 26).

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun ke depan dan menjaga konsistensi serta keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terarah menuju tercapainya integrasi, sinkronisasi, harmonisasi, efisien yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Disamping itu Rencana Kinerja Tahun 2023 ini merupakan acuan utama bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi.

Tujuan Penyusunan RKT Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan umum dan adminitrasi keuangan dalam satu tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
2. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
3. Sebagai acuan dalam pelaporan capaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4 Hubungan Rencana Kinerja Tahunan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

telah ditetapkan didalam Rencana Strategis. Dalam upaya pencapaian target kinerja pada setiap indikator setiap levelnya ditopang oleh program dan kegiatan. Keterhubungan perencanaan kinerja sebagaimana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



1. 5 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang, landasan penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, ruang lingkup, hubungan dokumen rencana kinerja dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penyajian Rencana Kinerja Tahun 2024.

Bab II Rencana Strategis Perangkat Daerah

Menjelaskan Rencana Pembangunan lima tahunan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2026 yang mencakup Gambaran Umum Perangkat Daerah, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.

Bab III Capaian Kinerja Tahun 2023

Menjelaskan sejauh mana pencapaian kinerja secara umum dan disajikan per sasaran strategis pada Tahun 2023.

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

Bab IV Rencana Kinerja Tahun 2024

Menjelaskan mengenai Rencana Kinerja Tahun 2024 yang menyajikan indikator-indikator bersifat strategis, makro dan mikro disertai dengan target kinerja yang akan diupayakan untuk dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.

Bab V Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 dan menguraikan saran yang diperlukan guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

Lampiran

Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Pasal 15 ayat(2) dan Pasal 19 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 89 ayat(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen bersifat taktis strategis yang menjabarkan strategi pembangunan yang akan dijalankan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode Tahun 2021-2026. Sesuai amanat pasal 5 ayat (2) Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan Peraturan Daerah terkait rencana pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2021-2026 dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Fungsi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai Pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD setiap tahun anggaran serta sebagai Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Bidang urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dengan adanya Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 ini, diharapkan akan mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah selama 5 tahun kedepan.

2.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah membentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah di Bidang Keuangan.

2.1.1 Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

1. Tugas

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh Kepala Badan terdapat susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 1. Subbidang Penyusunan Anggaran;
 2. Subbidang Pengendalian Anggaran; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahkan:
 1. Subbidang Pengelola Kas Daerah;
 2. Subbidang Belanja Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 1. Subbidang Analisa Data;
 2. Subbidang Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan :
 1. Subbidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset;
 2. Subbidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

2.2 Tujuan dan Sasaran

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Bupati Kuantan Singingi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian misi ke 2 yaitu **“Mewujudkan Manajemen Birokrasi Pemerintahan yang profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Berwawasan dan Demokratis”**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi perlu merumuskan tujuan dan sasaran. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran menterjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJMD.

Sasaran RPJMD selain menterjemahkan visi, misi dan tujuan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi terpilih juga mesti selaras dengan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005-2025 khususnya pada tahap keempat (2020-2025), hal ini dimaksudkan menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan jangka panjang dengan pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya, dimana capaian indikator kinerja tujuan merupakan

RENCANA KINERJA TAHUNAN |

TAHUN 2024

capaian kinerja Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan, sedangkan capaian indikator sasaran merupakan capaian kinerja setiap tahunnya. Dengan demikian, setiap tujuan dan sasaran RPJMD memiliki indikator yang terukur, relevan dengan apa yang akan diperbaiki dan dapat diukur setiap tahunnya mulai tahun 2021-2026.

Adapun tujuan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat di lihat pada tabel 2.1 Berikut ini.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Lama Waktu Penyelenggaraan penatausahaan Keuangan	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
			Ketepatan waktu penyampaian LKPD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
		Meningkatnya penatausahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Persentase aset yang dikelola sesuai aturan	70	75	75	80	80

Sumber: Data 2023, Renstra BPKAD 2021-2026

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2021-2026 berdasarkan tantangan dan peluang yang telah dijelaskan serta permasalahan dari internal baik kekuatan dan kelemahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

RENCANA KINERJA TAHUNAN |

TAHUN 2024

dengan menggunakan teknik analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut ini.

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sesuai Dengan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Hrmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH) di Provinsi Riau Tahun 2026				
Misi 2 : Mewujudkan Manajemen Birokrasi Pemerintahan yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Berawasan dan Demokratis				
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya kualitas tata Kelola keuangan daerah	Penyampaian Perda APBD/Perubahan APBD tepat waktu	Melakukan koordinasi dengan DPRD
			Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Melakukan koordinasi dan konsolidasi terhadap OPD
			Mengoptimalkan Pelayanan dalam Penatausahaan Keuangan	Meningkatnya pembinaan terhadap pengelolaan keuangan
		Meningkatnya Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Berkuaitas	Kesesuaian Laporan Barang Milik Daerah OPD	Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi terhadap laporan BMD OPD

Sumber: Data 2023, Renstra BPKAD 2021-2026

Berdasarkan tabel 2.2 di atas sesuai dengan misi 2 pada RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi 2021-2026 maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel dengan sasaran Meningkatkan tata kelola keuangan yang berkualitas dan akuntabel dan Meningkatkan penata usahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas. Adapun strategi yaitu dengan cara mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan arah kebijakan meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan.

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

BAB III CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021.

Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp 270.521.948.269,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 3 Program 13 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan. 3 Program tersebut terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tabel 3.1 LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA PEMBIAYAAN		TARGET CAPAIAN (%)	KET
		ALOKASI	REALISASI		
1	2	4	12	13	16
5.2.	BELANJA LANGSUNG	270.521.948.269,00	267.609.500.619,00	98,92	
5.02.5.02.0.001.2.01.	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.682.700,00	12.682.700,00	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.200.000,00	97,14	
5.02.5.02.0.001.2.01.07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.250.000,00	5.213.000,00	99,30	
5.02.5.02.0.001.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.524.387.178	9.252.555.197,00	97,15	
5.02.5.02.0.001.2.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.611.690.213,00	10.418.626.518,00	98,18	

RENCANA KINERJA TAHUNAN |

TAHUN 2024

5.02.5.02.0.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	356.430.000,00	327.434.474,00	91,87	
5.02.5.02.0.001.2.05.02	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000,00	72.499.874,00	96,67	
5.02.5.02.0.001.2.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	356.430.430,00	302.311.297,00	84,82	
5.02.5.02.0.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	541.573.900,00	336.180.267,00	62,07	
5.02.5.02.0.001.2.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000,00	4.525.000,00	43,10	
5.02.5.02.0.001.2.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.620.000,00	125.707.200,00	95,51	
5.02.5.02.0.001.2.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77.769.600,00	61.265.300,00	78,78	
5.02.5.02.0.001.2.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.175.000,00	5.175.000,00	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.874.800,00	308.437.479,00	64,21	
5.02.5.02.0.001.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	202.700.000,00	138.500.000,00	68,33	
5.02.5.02.0.001.2.07.10	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.440.600,00	10.411.800,00	99,72	
5.02.5.02.0.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	596.411.630,00	468.551.570,00	78,56	
5.02.5.02.0.001.2.08.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.935.000,00	34.595.000,00	99,03	
5.02.5.02.0.001.2.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	811.309.390,00	775.915.000,00	95,64	
5.02.5.02.0.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	408.954.352,00	317.144.301,00	77,55	
5.02.5.02.0.001.2.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.450.000,00	40.447.500,00	99,99	

RENCANA KINERJA TAHUNAN |
TAHUN 2024

5.02.5.02.0.001.2.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	246.220.000,00	246.210.000,00	100,00	
5.02.5.02.0.001.2.09.09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.897.100,00	59.814.000,00	95,10	
5.02.5.02.0.001.2.09.10	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.340.000,00	71.744.000,00	90,43	
5.02.5.02.0.002.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.222.475.800,00	860.495.530,00	70,39	
5.02.5.02.0.002.2.01.01	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	43.452.350,00	41.472.500,00	95,44	
5.02.5.02.0.002.2.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	35.465.300,00	28.966.000,00	81,67	
5.02.5.02.0.002.2.01.05	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	21.309.000,00	17.246.500,00	80,94	
5.02.5.02.0.002.2.01.06	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	35.211.100,00	18.263.100,00	51,87	
5.02.5.02.0.002.2.01.07	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	391.862.500,00	327.320.100,00	83,53	
5.02.5.02.0.002.2.01.08	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBDtentang Penjabaran APBD	268.758.100,00	184.988.200,00	68,83	
5.02.5.02.0.002.2.01.09	- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	176.044.000,00	108.849.030,00	61,83	
5.02.5.02.0.002.2.01.10	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	50.193.000,00	18.874.000,00	37,60	
5.02.5.02.0.002.2.01.11	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	164.041.200,00	82.184.000,00	50,10	
5.02.5.02.0.002.2.01.12	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	38.288.000,00	34.354.000,00	89,73	
5.02.5.02.0.002.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	400.539.300,00	375.222.532,00	93,68	

RENCANA KINERJA TAHUNAN |
TAHUN 2024

5.02.5.02.0.002.2.02.01	- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	11.946.400,00	11.113.255,00	93,03	
5.02.5.02.0.002.2.02.03	- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	40.017.500,00	35.800.217,00	89,46	
5.02.5.02.0.002.2.02.04	- Penatausahaan Pembiayaan Daerah	7.130.400,00	6.730.400,00	94,39	
5.02.5.02.0.002.2.02.05	- Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6.673.900,00	6.134.778,00	91,92	
5.02.5.02.0.002.2.02.07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	14.787.200,00	12.484.148,00	84,43	
5.02.5.02.0.002.2.02.08	- Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	9.509.000,00	8.705.700,00	91,55	
5.02.5.02.0.002.2.02.09	- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	25.795.100,00	12.828.100,00	49,73	
5.02.5.02.0.002.2.02.10	- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	152.348.000,00	152.291.376,00	99,96	
5.02.5.02.0.002.2.02.11	- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	132.331.800,00	129.134.558,00	97,58	
5.02.5.02.0.002.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	868.410.900,00	803.873.432,00	92,57	

RENCANA KINERJA TAHUNAN |

TAHUN 2024

5.02.5.02.0.002.2.03.03	- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	38.691.000,00	35.105.000,00	90,73	
5.02.5.02.0.002.2.03.04	- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	334.684.000,00	312.396.493,00	93,34	
5.02.5.02.0.002.2.03.05	- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	68.716.000,00	64.074.779,00	93,25	
5.02.5.02.0.002.2.03.09	- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah	262.551.200,00	232.519.492,00	88,56	
5.02.5.02.0.002.2.03.10	- Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	85.327.200,00	84.338.200,00	98,84	
5.02.5.02.0.002.2.03.11	- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	78.441.500,00	75.439.468,00	96,17	
5.02.5.02.0.002.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	255.435.365.809,00	254.030.265.033,00	99,45	
5.02.5.02.0.002.2.04.08	- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	253.914.259.259,00	253.630.715.889,00	99,89	
5.02.5.02.0.002.2.04.09	- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.521.106.550,00	399.549.144,00	26,27	
5.02.5.02.0.002.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	541.316.900,00	352.895.460,00	65,19	
5.02.5.02.0.002.2.05.02	- Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	330.000.000,00	161.700.000,00	49,00	
5.02.5.02.0.002.2.05.03	- Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	211.316.900,00	191.195.460,00	90,48	

RENCANA KINERJA TAHUNAN |

TAHUN 2024

5.02.5.02.0.003.2.01.	Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Keuangan Daerah	410.699.800,00	333.700.123,00	81,25	
5.02.5.02.0.003.2.01.01	- Penyusunan Standar Harga	52.824.000,00	40.834.000,00	77,30	
5.02.5.02.0.003.2.01.03	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	57.583.500,00	40.637.500,00	70,57	
5.02.5.02.0.003.2.01.05	- Penatausahaan Barang Milik Daerah	174.739.900,00	151.916.223,00	86,94	
5.02.5.02.0.003.2.01.10	- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	48.756.700,00	35.607.700,00	73,03	
5.02.5.02.0.003.2.01.11	- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	76.795.700,00	64.704.700,00	84,26	
	JUMLAH	270.521.948.269,00	267.609.500.619,00	98,92	

Sumber: Data Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2022, 2023.

Berdasarkan tabel diatas, persentase realisasi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 adalah 98,92 % dari total pagu anggaran.

Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023 berdasarkan sasaran dan indikator strategis, sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah

Meningkatnya kualitas tata Kelola keuangan daerah merupakan salah satu sasaran strategis untuk mendukung tujuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator yang menjadi alat ukur dalam pencapaian sasaran ini adalah :

a. Ketepatan Waktu Penetapan APBD

Salah satu indikator dalam mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah penetapan APBD yang tepat waktu. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan untuk dapat menetapkan APBD setiap tahunnya tepat waktu. Target Penetapan APBD yang akan di sahkan atau ditentukan dalam penetapan APBD paling lambat setiap tanggal 30 november setiap tahunnya. Untuk APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2023 sudah ditetapkan pada 30 November 2022 Atau sudah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dimana paling lambat APBD harus ditetapkan atau

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

disahkan setiap tanggal 30 November setiap tahunnya. Dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 yang sudah tepat waktu menunjukkan semakin meningkatnya kualitas tata Kelola keuangan daerah dalam rangka mencapai tujuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Lama Waktu Penyelenggaraan Penatausahaan Keuangan

Selanjutnya indikator dalam mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah lama waktu penyelenggaraan penatausahaan keuangan. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan untuk dapat menyelenggarakan proses penatausahaan keuangan dan selesai diproses sesuai dengan lama hari yang ditentukan. Target penyelesaian proses penyelenggaraan penatausahaan keuangan ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 2 hari kerja dan proses penyelesaiannya sudah sesuai dengan target yang ditentukan maksimal 2 hari kerja tersebut.

Dengan penyelenggaraan penatausahaan keuangan yang sudah dapat diselesaikan tepat waktu atau sesuai dengan batas hari yang ditentukan menunjukkan semakin meningkatnya kualitas tata Kelola keuangan daerah dalam rangka mencapai tujuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD

Kemudian indikator yang terakhir dalam mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan keuangan perangkat daerah atau LKPD yang tepat waktu. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan untuk dapat menyusun dan membuat laporan keuangan setiap tahunnya tepat waktu. Waktu pembuatan dan penyusunan laporan keuangan daerah diberi target dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan sesuai dengan jangka waktu yang ditargetkan. Untuk LKPD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sudah menyampaikan laporan keuangan daerah kepada BPK perwakilan Provinsi Riau sudah sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Dengan penyerahan laporan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2023 yang sudah tepat waktu juga menunjukkan semakin meningkatnya kualitas tata Kelola keuangan daerah dalam rangka mencapai tujuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas

RENCANA KINERJA TAHUNAN |

TAHUN 2024

Capaian sasaran Meningkatnya Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas ini ditunjukkan oleh indikator kinerja utama yaitu :

a. Persentase Aset yang Dikelola Sesuai Aturan

Indikator dalam mengukur penatausahaan Barang Milik Daerah adalah persentase aset yang dikelola sesuai dengan aturan. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan untuk dapat mengelola aset yang dimiliki oleh daerah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pada tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menargetkan untuk aset yang sudah dikelola sesuai dengan aturan yang ditetapkan sebesar 70% dari jumlah total aset daerah. Sedangkan aset daerah yang sudah dikelola sesuai aturan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah mencapai 70% atau sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan persentase aset daerah yang dikelola pada tahun 2022 yang sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 70% menunjukkan semakin meningkatnya penatausahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pengukuran target kinerja utama yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel capaian indikator utama, selanjutnya digunakan untuk mengukur Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023. Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023**

NO	INDIKATOR	Kondisi 2022	2023			TARGET AKHIR RPJMD (2026)	CAPAIAN sd 2023 TERHADAP 2026(%)
			Target	Realisasi	Capaian Realisasi		
1	Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
2	Ketepatan waktu penyampaian LKPD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Penyelenggaraan penatausahaan sesuai aturan (hari)	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
4	Persentase aset yang dikelola sesuai aturan	70	75	75	75	100	75

Sumber: Renstra BPKAD Tahun 2021-2026

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikemukakan bahwa dari 4 indikator kinerja utama yang ada pada tahun 2023 secara umum semua indikator baik itu ketepatan waktu pnetapan APBD, ketepatan waktu penyampaian LKPD, Penyelenggaraan penatausahaan sesuai aturan dan persentase aset yang dikelola sesuai aturan telah menunjukkan capaian sesuai atau memenuhi dengan yang telah di targetkan. Hal ini menunjukan bahwa kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah di Kabupaten Kuantan Singingi semakin meningkat dan didukung dengan capaian opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah memenuhi target menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan stakeholder yang terkait selama tahun 2023 dalam hal pelaksanaan urusan tersebut yang sangat baik dan harus didukung pula dengan penganggaran yang memadai.

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

BAB IV RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja adalah penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dan merupakan komitmen yang akan dicapai pada tahun 2024. Rencana Kinerja merupakan target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program dan kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Penjabaran dari seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian diformulasikan dalam dokumen rencana kinerja.

Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dituangkan dalam bab ini menjabarkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja serta program dan kegiatan sebagai pendukung terealisasinya target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi akan dicapai pada Tahun 2023, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka peranan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasaranan serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan yang diharapkan akan dapat

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

diselesaikan selama periode pelaksanaan rencana strategis 2021-2026. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut ini :

- a) Rendahnya indeks kemandirian keuangan daerah, dapat dilihat dari kontribusi realisasi PAD terhadap APBD masih dibawah 10% setiap tahunnya;
- b) Turunnya rasio belanja langsung (belanja pembangunan) terhadap total APBD berada pada kisaran di bawah 10%. Penurun rasio belanja langsung terhadap total APBD akan mengakibatkan belanja modal akan mengalami penurunan dan secara otomatis akan berpengaruh terhadap penyediaan sarana dan prasarana atau infrastruktur produksi barang dan jasa sehingga berakibat pada perlambatan pergerakan pembangunan ekonomi;
- c) Meningkatnya rasio belanja tidak langsung (belanja operasi) terhadap total APBD, artinya belanja yang berkaitan dengan aparatur sangat tinggi.

Permasalahan-permasalahan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Adalah sebagai berikut:

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
2. Pencairan masih melakukan manual;
3. Pengintegriasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan belum maksimal;
4. Usulan PA, KPA dan Bendahara dari OPD terlambat
5. Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia;
6. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan serta pemanfaatan barang milik daerah belum Optimal;
7. Masih ada beberapa OPD yang mengirim laporan belum valid dan tidak sesuai dengan standar akuntansi serta belum tepat waktu;
8. Perlu adanya peningkatan kompetensi bagi pengurus barang pengguna di masing-masing OPD;
9. Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKMBD) perlu ditingkatkan.

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

Upaya yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah

1. Melakukan pendampingan kepada OPD dalam Pengintegriasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban;
2. Melakukan sosialisasi, konsolidasi, rekonsiliasi, sikronisasi dan bimbingan teknis untuk memotivasi OPD dalam menyusun laporan keuangan supaya data valid, sesuai standar akuntansi pemerintah dan tepat waktu;
3. Melaksanakan pendampingan terhadap perencanaan barang daerah dalam bentuk RKBMD, dan pendistribusian serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
4. Melakukan peningkatan penatausahaan Aset;
5. Meningkatkan kompetensi bagi pengurus barang OPD melalui Bimtek dan Pelatihan;
6. Memberi reward kepada bendahara dan pengurus barang OPD

4.2 Telaahan Visi dan Misi RPJMD

Visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) merupakan penjabaran visi Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi terpilih periode tahun 2021-2026 sebagai dasar perumusan program prioritas pembangunan daerah yang sudah disusun dan ditetapkan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan visi jangka menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sudah memperhatikan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi pada tahap keempat (2020-2025), isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024, maka Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH) di Provinsi Riau Tahun 2026”

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

Adapun makna pernyataan visi pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1. BERBUDAYA** mengandung makna terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada norma, nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika dan moral sehingga terbangunnya kehidupan sosial masyarakat yang bermartabat, berkarakter serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal;
- 2. RELIGIUS** mengandung makna bahwa terwujudnya masyarakat yang agamis, masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur keagamaan dan kepercayaan yang dianut, serta ajaran agama akan mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat serta menjadi pengikat keberagaman dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sehingga menjadi kontrol pembangunan daerah yang melahirkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang;
- 3. MAJU** mengandung pengertian bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilandasi keinginan bersama untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan masa depan politik, ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, tata ruang serta lingkungan hidup yang lebih baik sehingga terwujud akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing dan hasil-hasil pembangunan;
- 4. BERWAWASAN** mengandung makna bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berorientasi kepada penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi, sehingga terwujud birokrasi yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, profesional, memiliki peradaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia, berwawasan kedepan serta berorientasi pelayanan publik yang prima;

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

5. SEJAHTERA mengandung makna bahwa penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, memperoleh rasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan serta meningkatnya keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; dan

6. HARMONIS mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat, perlu didukung dengan kondisi yang aman, selaras, serasi, seimbang antara semua komponen masyarakat serta pelaku pembangunan yang mengedepankan kebersamaan, persatuan di tengah keberagaman masyarakat itu sendiri.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, maka dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dirumuskan penjelasan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 meliputi :

Misi 1 :

Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan dan kebudayaan, melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan serta peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya daerah.

Misi 2 :

Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

Misi 3 :

Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing, melalui pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender, selain itu untuk juga meningkatkan produktivitas atau daya saing kepemudaan dan kualitas hidup perempuan.

Misi 4 :

Mewujudkan kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur permukiman, infrastruktur pemerintah, infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.

Misi 5 :

Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur permukiman, infrastruktur pemerintah dan meningkatkan infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.

Berdasarkan visi Bupati Kuantan Singingi tersebut di atas maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berperan dalam melaksanakan Misi ke 2 yaitu **“Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis”**. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

peran ganda sebagai Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memiliki faktor-faktor penghambat maupun pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi, yaitu :

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
2. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua;
3. Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
4. Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban;
5. Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamanatkan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai;
6. Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia
7. Integritas, kinerja dan kesejahteraan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, dengan pelaksanaan pola kerja berbasis kinerja dan penerapan *reward and punishment* serta peningkatan standar moral ;
8. Kualitas dan efektifitas layanan, prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik, dengan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, komunikasi dan informasi yang memadai, serta pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi eksekutif;
9. Review dan pemutakhiran produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah beserta pedoman teknis pelaksanaannya;
10. Penyediaan data dan informasi yang berkualitas, dengan optimalisasi penggunaan serta penyempurnaan sistem informasi dan data base keuangan dan aset daerah serta pengintegrasian sistem informasi keuangan dengan sistem informasi barang milik daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Indikator kinerja ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Berikut ini memberikan informasi mengenai Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama, dan target capaian selama lima tahun dari Tahun 2021 hingga Tahun 2026 sebagaimana Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PER TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	5				
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Meningkatkan Kualitas tata kelola keuangan daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
			Lama waktu Penyelenggaraan penataausahaan keuangan	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
			Ketepatan waktu penyampaian LKPD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
2.		Meningkatkan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Persentase aset yang dikelola sesuai aturan	70	75	75	80	80

Sumber: Renstra BPKAD Tahun 2021-2026,

4.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, penetapan dan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi sudah seharusnya terintegrasi dan sinkron (sejalan) dengan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024.

Program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

01. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- 1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- 2 Evaluasi kinerja perangkat daerah

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- 2 Pendidikan dan pelatihan formal berdasarkan tugas dan fungsi

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 2 Penyediaan bahan logistik kantor
- 3 Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan
- 4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3 Pengadaan sarana dan prasana Gedung kantor atau bangunan lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1 Penyediaan jasa surat menyurat
- 2 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- 2 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- 3 Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
- 4 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya

02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- 1 Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS
- 2 Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 3 Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

- 4 Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD
- 5 Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
- 6 Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD
- 7 Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran
- 8 Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan
- 9 Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah
- 10 Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- 1 Koordinasi dan pengelolaan kas daerah
- 2 Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD
- 3 Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervise, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya
- 4 Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)
- 5 Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait
- 6 Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah

- 1 Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran
- 2 Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah
- 3 Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

- 4 Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah
- 5 Pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1 Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
- 2 Pengelolaan dana darurat dan mendesak

5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

- 1 Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah

03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 1 Penyusunan standar harga
- 2 Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
- 3 Penatausahaan barang milik daerah
- 4 Pengamanan barang milik daerah
- 5 Penilaian barang milik daerah
- 6 Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah
- 7 Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah
- 8 Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah
- 9 Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota

Program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

Tabel 4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp.)
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	02					KEUANGAN		313.402.312.927
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		14.258.040.485
5	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15.750.000,00
5	02	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pendukung Prioritas	10.762.500,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2.329.500,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		783.000,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		7.650.000,00
5	02	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	5.381.250,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		519.750,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		391.500,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1.650.000,00
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		2.820.000,00
5	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11.479.294.898,00
5	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Pelayanan Publik	11.479.294.898,00
5	1	01	01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS		2.877.853.303,00
5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		300.682.018,00
5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		142.805.000,00
5	1	01	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		103.200.000,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		93.535.000,00
5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		78.877.400,00
5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		20.257.728,00
5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		79.360,00
5	1	01	01	09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		128.913.008,00
5	1	01	01	10	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		6.288.288,00
5	1	01	01	11	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		18.864.958,00
5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		1.466.882.540,00
5	1	01	02	03	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		277.293.550,00
5	1	01	02	05	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS		1.202.808.750,00
5	1	01	02	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.432.560.000,00
5	1	01	03	08	0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		6.000.000,00
5	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		792.034.000,00
5	02	01	2	05	0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Peningkatan Pelayanan Publik	75.000.000,00
5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		960.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		119.000,00
5	1	02	01	01	0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		44.135.000,00
5	1	02	01	01	0074	Belanja Pakaian Adat Daerah		13.536.000,00
5	1	02	01	01	0076	Belanja Pakaian Olahraga		16.250.000,00
5	02	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Formal Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Pelayanan Publik	717.034.000,00
5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		3.480.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		395.000,00
5	1	02	02	12	0003	Belanja Bimbingan Teknis		297.500.000,00
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		243.625.000,00
5	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		633.159.135

RENCANA KINERJA TAHUNAN |

TAHUN 2024

5	02	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik	10.500.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		4.000,00
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		10.496.000,00
5	02	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik	166.620.000,00
5	1	01	02	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		1.600.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		47.629.000,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		37.171.000,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		17.260.000,00
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		62.960.000,00
5	02	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Publik	43.699.500,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		43.699.500,00
5	02	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Pelayanan Publik	11.800.000,00
5	01	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		11.800.000,00
5	02	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Pelayanan Publik	767.640.000,00
5	1	01	03	07	0007	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.900.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		29.000,00
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		745.286.000,00
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		19.425.000,00
5	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		866.000.000,00
5	02	01	2	07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		561.000.0000,00
5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		2.850.000,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		250.000,00
5	2	02	02	01	0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		557.900.000,00
5	2	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		240.000.000,00
5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		3.000.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		334.000,00
5	2	02	05	01	0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		32.524.000,00
5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Computer		199.632.000,00
5	2	02	10	02	0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		4.510.000,00
5	02	01	2	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Pelayanan Publik	65.000.000,00
5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		2.700.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		471.000,00
5	2	02	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin		24.725.000,00
5	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.229.457.720,00
5	02	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Publik	37.598.700,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		24.000,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		14.700,00
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		37.560.000,00
5	02	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Pelayanan Publik	1.191.859.020,00
5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		12.000.000,00
5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		525.000.000,00
5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli		554.400.000,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN |

TAHUN 2024

5	1	02	02	01	0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		45.000.000,00
5	1	02	02	01	0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		45.000.000,00
5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		4.648.524,00
5	1	02	02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		5.810.496,00
5	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		429.402.070
5	02	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Pelayanan Publik	41.467.900,00
5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.880.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		57.900,00
5	1	02	03	02	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		38.530.000,00
5	02	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Pelayanan Publik	252.832.650,00
5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		5.760.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		12.088.250,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		64.400,00
5	1	02	03	02	0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		234.920.000,00
5	02	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Pelayanan Publik	264.493.500,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		139.800,00
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		54.353.700,00
5	2	02	05	02	0001	Belanja Modal Mebel		210.000.000,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN |

TAHUN 2024

5	02	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Pelayanan Publik	281.342.900,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		741.900,00
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		12.750.000,00
5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		25.550.000,00
5	1	02	03	02	0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		11.040.000,00
5	2	03	01	01	0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor		231.261.000,00
5	02	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		298.205.886.713
5	02	02	2			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1.531.416.000,00
5	02	02	2	01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Peningkatan Pelayanan Publik	45.052.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		41.077.500,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		974.500,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		3.000.000,00
5	02	02	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Peningkatan Pelayanan Publik	39.758.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		35.339.500,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1.418.500,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		3.000.000,00
5	02	02	2	01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Peningkatan Pelayanan Publik	-
5	02	02	2	01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Pelayanan Publik	-
5	02	02	2	01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Peningkatan Pelayanan Publik	22.374.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		16.372.400,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1.501.600,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN |

TAHUN 2024

5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		4.500.000,00
5	02	02	2	01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Pelayanan Publik	36.971.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		32.471.000,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		4.500.000,00
5	02	02	2	01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Peningkatan Pelayanan Publik	626.347.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		86.292.500,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1.618.500,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		11.261.000,00
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.375.000,00
5	1	02	02	01	0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		523.800.000,00
5	02	02	2	01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Peningkatan Pelayanan Publik	168.886.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		92.434.200,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		3.365.800,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		19.522.000,00
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.200.000,00
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		50.364.000,00
5	02	02	2	01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Peningkatan Pelayanan Publik	255.942.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		6.514.000,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		3.360.000,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		4.500.000,00
5	1	02	02	12	0003	Belanja Bimbingan Teknis		126.000.000,00
5	1	02	04	01	0004	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		115.568.000,00
5	02	02	2	01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Peningkatan Pelayanan Publik	106.871.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		724.000,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1.344.000,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		6.000.000,00
5	1	02	04	01	0004	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		98.803.000,00
5	02	02	2	01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	194.015.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		100.500,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1.652.500,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		6.000.000,00
5	1	02	04	01	0004	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		178.612.000,00
1.	02	02	2	01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Peningkatan Pelayanan Publik	35.200.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1.336.000,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1.344.000,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		3.000.000,00
5	1	02	04	01	0004	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		29.520.000,00
5	02	02	2	02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		720.055.242,00
5	02	02	2	02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	83.848.892,0
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya		5.592,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		6.038.700,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN |

TAHUN 2024

5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		2.562.600,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		20.130.000,00
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.200.000,00
5	1	02	04	01	0004	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		53.912.000,00
5	02	02	2	02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Peningkatan Pelayanan Publik	64.362.107,00
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya		17.207,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		11.521.700,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		2.723.200,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		12.330.000,00
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.920.000,00
5	1	02	04	01	0004	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		35.850.000,00
5	02	02	2	02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Peningkatan Pelayanan Publik	32.743.722,00
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya		17.207,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		11.521.700,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		2.723.200,00
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1.200.000,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1.950.000,00
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		27.492.000,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

5	02	02	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Peningkatan Pelayanan Publik	29.798.662,00
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya		16.162,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2.337.500,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1.305.000,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		2.580.000,00
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		23.560.000,00
5	02	02	2	02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Peningkatan Pelayanan Publik	47.123.714,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		8.225.714,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1.488.000,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		13.500.000,00
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		23.910.000,00
5	02	02	2	02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan Publik	171.309.390
5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		1.440.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		85.300.045,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		45.560.100,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		50.425.000,00
5	1	02	02	12	0003	Belanja Bimbingan Teknis		82.500.000,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		196.953.000,00
5	02	02	2	03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1.036.945.600,00
5	02	02	2	03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Peningkatan Pelayanan Publik	95.764.800,00
5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		1.200.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		16.785.700,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1.499.100,00
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		120.000,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		7.400.000,00
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.440.000,00
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		61.320.000,00
5	02	02	2	03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	525.676.000,00
5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.900.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		8.129.000,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		3.249.000,00
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		180.000,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		9.000.000,00
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		31.500.000,00
5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli		150.000.000,0
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		320.718.000,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN |

TAHUN 2024

5	02	02	2	03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		113.796.000,00
5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		1.200.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		26.847.000,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1.305.000,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		3.000.000,00
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		81.444.000,00
5	02	02	2	03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	58.862.800,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		3.389.800,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1.305.000,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		3.000.000,00
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		800.000,00
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		50.368.000,00
5	02	02	2	03	11	Pembinaan Akutansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan Publik	242.846.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		266.000,00
5	1	02	02	12	0003	Belanja Bimbingan Teknis		120.000.000,00
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		122.580.000,00
5	02	02	2	04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		293.305.050.635,00
5	02	02	2	04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Peningkatan Pelayanan Publik	273.189.802.085,00
5	1	01	03	07	0007	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		13.320.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2.104.000,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN |

TAHUN 2024

5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		2.610.000,00
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		3.600.000,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		3.450.000,00
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		26.298.000,00
5	4	01	01	03	0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa		7.105.297.985,00
5	4	01	02	01	0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa		1.491.278.700,00
5	4	02	05	02	0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa		81.154.911.400,00
5	02	02	2	04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Peningkatan Pelayanan Publik	20.115.248.550,00
5	3	01	01	01	0001	Belanja Tidak Terduga		20.115.248.550,00
5	02	02	2	05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		450.000.000,00
5	02	02	2	05	02	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang Keuangan Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	450.000.000,00
5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		800.000,00
5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli		333.000.000,00
5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		16.200.000,00
5	1	02	03	02	0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan		100.000.000,00
5	02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		938.385.730
5	02	03	2	01		Pengelolaan Barang Milik Daerah		938.385.730
5	02	03	2	01	0001	Penyusunan Standar Harga	Peningkatan Pelayanan Publik	38.825.200,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		16.702.700,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		2.976.500,00
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		720.000,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN |

TAHUN 2024

5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		5.900.000,00
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.560.000,00
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.966.000,00
5	02	03	2	01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	50.025.200,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		17.028.200,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		2.127.000,00
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		420.000,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		6.500.000,00
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.140.000,00
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		15.310.000,00
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		4.500.000,00
5	02	03	2	01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	173.689.890,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		18.946.390,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		5.170.500,00
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		600.000,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		12.589.000,00
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		9.420.000,0000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		120.964.000,00
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		6.000.000,00
5	02	03	2	01	0008	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	70.003.500,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		8.362.000,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN |

TAHUN 2024

5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		2.237.500,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1.948.000,00
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		6.900.000,00
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		40.356.000,00
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		10.200.000,00
5	02	03	2	01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	59.467.240,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		8.362.000,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		2.237.500,00
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		360.000,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1.600.000,00
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		232.540,00
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.140.000,00
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		34.599.000,00
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		8.850.000,00
5	02	03	2	01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	43.996.740,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		4.636.200,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		800.000,00
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		360.000,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		3.826.000,00
5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		260.000,00
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		400.540,00
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		24.714.000,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		9.000.000,00
5	02	03	2	01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		41.532.900,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2.823.600,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		620.300,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		3.753.000,00
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.840.000,00
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		28.746.000,00
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3.750.000,00
5	02	03	2	01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Peningkatan Pelayanan Publik	123.655.800,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2.889.700,00
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		564.100,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		2.200.000,00
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		8.980.000,00
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		109.022.000,00
5	02	03	2	01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan Publik	146.624.730,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2.889.700,00
5	1	02	02	12	0003	Belanja Bimbingan Teknis		80.000.000,00
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		66.540.000,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN | TAHUN 2024

4 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

BAB V PENUTUP

RKT disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2021-2026 dengan berpedoman pada target kinerja tahun 2024. RKT Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya akan dilakukan pengukuran capaian kinerja dan evaluasi terhadap target yang telah ditetapkan.

Meskipun RKT ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak menemui permasalahan dan hambatan, untuk hal tersebut masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dalam peneyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan berikutnya. Dengan kesungguhan dalam penyusunan RKT ini, nantinya merupakan komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkannya.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi

H. MASRUL HAKIM, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19740701 200501 1 006

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI V-1